

KEMITRAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH PERTAMBANGAN DAN MIGAS



UNDEF



The United Nations
Democracy Fund

KEMITRAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH PERTAMBANGAN DAN MIGAS

KEMITRAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH PERTAMBANGAN DAN MIGAS

Sekapur Sirih:

Dr. Bambang Hidayana

Kata Sambutan:

Sukasmanto, M.Si (Direktur Eksekutif IRE)

Penulis:

Bambang Hidayana

M. Zainal Anwar

Machmud. N.A

Institute for Research and Empowerment

www.ireyogya.org

Februari, 2012

Program Kerjasama : IRE - UNDEF



KEMITRAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DAERAH PERTAMBANGAN DAN MIGAS

Cetakan I, Februari 2012

Tata Letak & Cover : Ipank

© 2012 Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta
All rights Reserved. Dilarang memperbanyak atau mengutip dalam cara
dan bentuk apapun, baik dengan cara mekanik maupun elektronik,
termasuk mengkopi, atau dengan cara *information storage and retrieval
system*, tanpa izin tertulis dari IRE Yogyakarta.



IRE Yogyakarta

Dusun Tegalrejo Rt 01/Rw 09 Desa Sariharjo, Ngaglik

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9,5 Sleman Yogyakarta 55581

Telp./Fax. +62-274-867686

Email: office@ireyogya.org [http: //www.ireyogya.org](http://www.ireyogya.org)

Sambutan Direktur Eksekutif IRE



Kemiskinan dan ketidakberdayaan yang ada di masyarakat adalah permasalahan yang kini terus dicarikan jalan keluarnya oleh berbagai pihak. Namun demikian upaya tersebut belum berhasil secara maksimal. Program dan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan dari pemerintah, misalnya, datang silih berganti dengan berbagai nama dan alokasi anggaran yang senantiasa meningkat, tetapi dampaknya hingga kini masih belum optimal.

Sejak awal, *Institute for Research and Empowerment* (IRE) berkomitmen untuk mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dan memperkuat masyarakat yang tidak berdaya. Dalam pandangan IRE, kemiskinan dan ketidakberdayaan membuat daya kritis dan otonomi masyarakat menjadi lemah. Akibatnya, masyarakat tidak

berdaya menghadapi struktur ekonomi dan politik yang ada di atasnya. Hambatan struktural ekonomi dan politik tersebut menjadi ancaman yang terus berlangsung bagi agenda peningkatan kesejahteraan sehingga IRE selalu tetap terpenggil untuk mencari jalan keluarnya.

IRE juga berharap dapat menjadi lembaga penelitian yang memiliki jejaring kuat dengan komunitas akademik di Yogyakarta. Visi IRE adalah menjadi organisasi yang berperan dalam mengembangkan pengetahuan untuk memengaruhi kebijakan strategis menuju terwujudnya negara yang kuat dan masyarakat lokal yang mandiri. Sesuai dengan mandat dan visinya, IRE mengembangkan sejumlah misi sebagai berikut: mengembangkan pengetahuan melalui penelitian, pengembangan kapasitas, dan publikasi, membangun persenyawaan (*engagement*) multipihak untuk reformasi kebijakan, mendorong negara bertanggung jawab memenuhi hak-hak warga dan komunitas, dan memperkuat emansipasi entitas lokal yang berorientasi kesejahteraan.

Berpijak pada eksistensi tersebut, IRE senantiasa berusaha untuk memanfaatkan adanya kesempatan agar bisa berkontribusi dalam upaya memerangi kemiskinan dan ketidakberdayaan yang dialami masyarakat kecil. Program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan di industri pertambangan dan migas dengan cara memperkuat kinerja LSM lokal adalah salah satu kesempatan yang IRE dapatkan melalui dukungan penuh dari UNDEF (*United Nations for Democracy Fund*) yakni sebuah lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki komitmen untuk memajukan demokrasi dan kesejahteraan di dunia.

Ke depan, IRE senantiasa membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak manapun guna menanggulangi masalah akut bangsa ini: kemiskinan dan ketidakberdayaan. IRE berharap bahwa melalui program tersebut dan berbagai program dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan kelompok marjinal, maka upaya menghadirkan kesejahteraan, kemandirian dan *democratic civility* masyarakat lokal bukan sesuatu yang utopis tetapi bisa menjadi kenyataan. Mungkin hasilnya tidak dapat kita rasakan sekarang, tetapi paling tidak, cita-cita dan upaya tersebut tidak boleh surut apalagi padam.

Yogyakarta, Februari 2012

Sukasmento, M.Si
Direktur Eksekutif IRE



Sekapur Sirih



Dunia dan tidak terkecuali Indonesia sedang melakukan perang melawan kemiskinan. Bahkan pemerintah Indonesia sedang menggalang agenda percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu agenda yang harus dicanangkan adalah percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah kerja industri pertambangan dan migas. Hal ini karena di daerah yang kaya sumber daya alam justru memiliki angka kemiskinan yang relatif cukup tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masing-masing stakeholder, tetapi nampaknya gejala kemiskinan di daerah industri pertambangan dan migas tersebut masih mengemuka. Oleh karena itu, berbagai pemangku kepentingan baik donor, lembaga penelitian, LSM dan Pemerintah khususnya pemerintah daerah patut memberikan kontribusi terhadap agenda tersebut

dengan cara meningkatkan kerjasama kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah industri pertambangan dan migas di tanah air.

Memang pemerintah, dan pemerintah daerah sudah mencanangkan program penanggulangan kemiskinan yang mampu menekan angka kemiskinan menjadi sekitar 15 persen pada tahun 2011. Perusahaan migas dan tambang melalui program CSRnya juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di aras lokal. Namun demikian, masalah kemiskinan di daerah industri pertambangan dan migas tersebut seharusnya tidak ada, dan kalau pun ada harus amat kecil angkanya. Hal ini karena disamping merupakan daerah pertumbuhan ekonomi yang deigerakkan oleh investasi di sektor pertambangan, di daerah tersebut juga dicanangkan program CSR yang besar dananya. Apa yang terjadi adalah masalah kemiskinan di daerah industri pertambangan dan migas relatif sangat ruwet dan rawan menimbulkan ketegangan sampai dengan konflik sosial ekonomi yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan). Hal ini karena kemiskinan itu memang berinterseksi dengan masalah SARA yang sering menimbulkan konflik sosial ekonomi di Indonesia baik yang bersifat tertutup maupun terbuka, berskala lokal hingga nasional.

Fakta seringkali mengungkapkan bahwa golongan yang menikmati adanya pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan pekerjaan serta kesempatan berusaha justru bukan penduduk lokal, melainkan pendatang. Dengan demikian, terjadilah kesenjangan sosial ekonomi antara penduduk lokal yang secara tradisional telah menguasai

sumber daya alam tetapi memiliki kelemahan kapasitas, pendidikan dan pengalaman terhadap pendatang yang memiliki kelebihan kapasitas, pendidikan dan pengalaman bekerja dan berusaha. Selain itu, para pendatang seringkali mempunyai identitas kelas, agama, budaya dan golongan yang berlainan sehingga kehadiran mereka bisa memicu, mendorong ataupun memperkuat konflik-konflik horisontal di aras lokal.

Fakta juga sering mengungkapkan bahwa penduduk lokal maupun lapisan bawah tidak serta merta bisa bangkit dan memperoleh akses atas pertumbuhan ekonomi yang dipicu dan digerakkan oleh adanya investasi atau kehadiran para pendatang. Berbagai studi sering mengungkapkan bahwa kemajuan ekonomi di aras lokal yang digerakkan oleh investasi dari luar dapat mengancam eksistensi dan keberlanjutan ekonomi lokal yang menjadi tulang punggung penduduk lokal khususnya golongan lapisan bawah. Mereka ini harus berkompetisi secara ketat dengan lapisan menengah keatas yang lebih kuat dalam mengontrol sumber daya alam. Air bersih, misalnya dulu tersedia melimpah, tetapi kemudian menjadi langka dan sumber kehidupan ini dikuasai oleh bisnis kapitalis sehingga mereka harus membeli daripada mengakses secara gratis sebagaimana terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, tidak berlebihan bahwa kehadiran usaha skala menengah keatas yang berusaha menguasai sumber daya lokal justru dapat menimbulkan marjinalisasi golongan lapisan bawah.

Belajar dari persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat lapisan bawah di wilayah industri pertambangan dan migas di atas, maka jalan keluar

untuk memberdayakan mereka tersebut adalah bukan membangun kesadaran kritis golongan miskin ini untuk menjadi pemberontak. Strategi yang mengedepankan perlawanan dengan cara kekerasan hanya akan menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang justru akan meminggirkan mereka yang lemah secara ekonomi maupun politik. Selain itu, kekerasan itu sendiri akan menghasilkan pendangkalan humanisme di kalangan masyarakat kecil. Oleh karena itu, strategi yang lebih tepat tetap berakar pada prinsip-prinsip pemberdayaan yang menghargai nilai-nilai seperti kemandirian, toleransi, kesetiakawanan, keadilan dan kesetaraan.

Gagasan mewujudkan pemberdayaan dengan berpijak pada nilai-nilai tersebut dikembangkan oleh IRE melalui program yang dikenal dengan nama “Penanggulangan Kemiskinan melalui Penguatan LSM Lokal di daerah Industri Pertambangan dan Migas”. Program ini memandang bahwa ke depan percepatan penanggulangan kemiskinan akan diraih di wilayah industri pertambangan dan migas jika program CSR ditingkatkan kadar dan strateginya dengan menggalang kerjasama kemitraan, penguatan kelembagaan dan substansi program yang lebih responsif dan handal dalam menangani kemiskinan. Oleh karena masalah kemiskinan adalah kurangnya kapasitas dan trust LSM lokal, maka langkah strategi untuk mewujudkan agenda kemitraan tersebut adalah memperbaiki kinerja LSM lokal. Jika sebelumnya LSM lokal lebih dikenal sebagai CSO (*Civil Society Organization*) yang vokal dan kritis terhadap perusahaan yang bergerak di industri ekstraktif dan pemda yang dipandang kurang responsif terhadap kelompok miskin, maka ke depan perlu muncul LSM-LSM lokal yang sangat terampil dan

terpercaya menjadi pendamping masyarakat miskin dan golongan perempuan lapisan bawah dalam memecahkan masalah kemiskinan. Dengan demikian, LSM lokal pun bisa menjadi mitra terpercaya bagi perusahaan dan pemda dan bahu membahu melakukan aksi nyata yang mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk mewujudkan program IRE tersebut bergayung sambut dengan agenda komunitas global dalam hal ini adalah PBB dan stakeholder di aras nasional seperti Bappenas, BP Migas, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan pemda serta perusahaan. Mereka sama-sama sangat berkepentingan untuk memerangi kemiskinan dan menyadari pentingnya kemitraan sehingga dapat terwujud suatu percepatan penanggulangan kemiskinan yang efektif dan terpercaya serta mempererat kohesi sosial di masyarakat.

Langkah-langkah untuk mewujudkan program kemitraan di atas, dirintis melalui serangkaian kegiatan yang partisipatoris. Pertama, melakukan pemetaan masalah kemiskinan dan ketidakberdayaan secara kolaboratif antara pihak pemda, perusahaan dan LSM lokal yang dilaksanakan dalam bentuk riset lapangan, FGD dan lokakarya daerah. Kedua, melakukan rencana aksi dalam bentuk penguatan kapasitas dan *trust* pada LSM lokal sebagai mitra perusahaan dan pemda dalam agenda penanggulangan kemiskinan. Ketiga, melakukan penguatan LSM lokal melalui pelatihan penguatan lembaga dan program aksi dan melakukan pendampingan LSM tersebut ketika mempromosikan proposal kegiatan inovatif bagi penanggulangan kemiskinan di daerah. Inovatif dimaknai sebagai suatu agenda yang mampu

secara riil mengurangi angka kemiskinan dengan program yang berbasis pada sumber daya lokal, partisipasi kelompok miskin dan perempuan marjinal dan bergayung sambut dengan program CSR, pemda dan pemerintah pusat seperti MDGs. Keempat, mendiseminasikan *lesson learned* agenda dan program kemitraan tersebut ke para pemangku kepentingan yang lebih luas baik di daerah maupun di aras nasional. Kelima, mendorong keberlanjutan agenda percepatan penanggulangan kemiskinan melalui skema kemitraan antara perusahaan, pemerintah, pemerintah daerah dan CSO.

Buku kecil ini merupakan proceeding dari kegiatan IRE tersebut didalam mendorong terwujudnya kemitraan antar pemangku kepentingan tersebut didalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. Terselenggaranya program dan tersusunnya buku proceeding workshop ini mencerminkan adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada UNDEF (United Nation for Democracy Fund) yang diwakili oleh Dr. Roland Rich dan Ishaani Sen yang memfasilitasi kegiatan kami tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BP Migas, Bappenas, Kemenkokesra, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian ESDM atas partisipasinya dan dukungan atas keberlanjutan program. Kami juga berterima kasih kepada Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, Pemda Kabupaten Kutai Timur, Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemda Kabupaten Bojonegoro dan Pemda Kabupaten Anambas, atas partisipasinya dalam workshop nasional dan regional. Demikian pula kami mengucapkan terima kasih kepda perusahaan yang ikut mendukung kegiatan

kami di lapangan seperti PT NNT, KPC, Exxon Mobil, dan Premiere Oil, Chevron serta Petro China dan lainnya yang hadir dalam rangkaian workshop dan pelatihan. Tidak ketinggalan pula, kami mengucapkan terima kasih kepada Bina Swadaya, Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan (PSPK), Jurusan Pembangunan Sosial Fisipol, dan Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (Laura) Jurusan Antropologi FIB UGM.

Yogyakarta, Februari 2012

Dr. Bambang Hidayana, MA
Manajer Program

Daftar Isi

Sambutan Direktur Eksekutif IRE.....	v
Sekapur Sirih.....	ix
Daftar isi.....	xvii
Sekilas Lokakarya Nasional.....	1
Ringkasan.....	3
Model Kemitraan dan Peran antar Stakeholder dalam Penanggulangan Kemiskinan.....	7
Keterlibatan Perusahaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan.....	17
CSR Pro Poor.....	21
Rencana Ke Depan.....	25
Lampiran	27
A.Profil IRE.....	27
B.Daftar Peserta dan Narasumber Lokakarya Nasional	34
C.Dokumentasi Kegiatan.....	40

Sekilas Lokakarya Nasional

Kegiatan lokakarya nasional ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan program penanggulangan kemiskinan di wilayah industri pertambangan dan migas melalui penguatan kemitraan antara Perusahaan, Pemerintah daerah dan masyarakat sipil (CSO). Lokakarya ini diawali dengan program penguatan kemitraan melalui pelatihan, pendampingan, lokakarya daerah dan lokakarya nasional. Dengan demikian, lokakarya ini merupakan lokakarya terakhir yang berfungsi untuk mematangkan agenda kemitraan dan program-programnya sehingga bisa mendorong terwujudnya penanggulangan kemiskinan di daerah.

Lokakarya ini dilakukan pada 18 - 20 Januari 2012 di Kota Pangkal Pinang – Provinsi Bangka Belitung. Kegiatan ini diikuti sekitar 45 orang yang berasal dari kementerian dan instansi pusat, perusahaan, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, perguruan tinggi serta LSM nasional. Selain itu, kegiatan ini dihadiri para peneliti dan tim program dari IRE Yogyakarta.

Lokakarya nasional ini diselenggarakan oleh IRE Yogyakarta dengan dukungan UNDEF (*United Nation for Democracy Fund*). Kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup (Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan/Asisten Deputi Urusan Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi Dan Migas) dan BP. Migas yang ikut berperan sebagai pihak pengundang.



Narasumber dalam lokakarya nasional ini terdiri dari 4 Kementerian, yaitu Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra), Kementerian Sosial dan BP Migas, dengan *keynote speaker* dari Bappenas. Selain itu, kegiatan ini mengundang *Corporate Forum Community Development* (CFCD) sebagai pembicara yang diharapkan bisa menjelaskan pengalaman mereka selama ini dalam pengelolaan forum yang terdiri dari beberapa perusahaan yang bergerak di bidang CSR. Disamping itu, pihak IRE juga menyampaikan presentasi terkait pengalaman dan capaian program.



Pembicara Loknas 3 di Pangkal Pinang.

Ringkasan

Buku ini memperbincangkan perihal kemitraan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah industri pertambangan dan migas. Harus diakui bahwa berbagai stakeholder telah bekerja keras mendorong hadirnya kesejahteraan sekaligus memerangi kemiskinan terutama di daerah tambang. Baik pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) serta perusahaan melalui kegiatan *Community development* (Comdev) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah bekerja keras menciptakan program dan kegiatan dalam ikhtiar memajukan daerah dan mengurangi kemiskinan terutama di daerah industri pertambangan dan migas. Akan tetapi, masih tingginya angka kemiskinan khususnya di daerah tersebut menjadi tantangan yang senantiasa diupayakan pemecahannya. Hal ini salah satunya dengan mendorong adanya kemitraan yang lebih responsif dan efektif diantara berbagai stakeholder yang berkepentingan di daerah industri pertambangan dan migas.

Dalam kurun 2 tahun terakhir ini, *Institute for Research and Empowerment* (IRE) dengan dukungan badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni *United Nations for Democracy Fund* (UNDEF) yaitu salah satu badan PBB yang mempromosikan demokrasi untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat berupaya memperkuat *trust building* dan kerjasama yang baik antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM dan perusahaan, melalui pengembangan kapasitas dan kredibilitas LSM dan *Community Based Organization* (CBO) sebagai mitra pelaksana program CSR dan pembangunan komunitas yang diselenggarakan oleh Pemda bagi peningkatan

kesejahteraan orang desa dalam konteks penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Program ini IRE lakukan di 5 daerah yakni Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Bojonegoro.

Sejauh ini, IRE telah mirintis munculnya agenda aksi kemitraan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah industri pertambangan dan migas. Rintisan itu telah dimulai dengan menyelenggarakan *need assessment* dan lokakarya daerah dengan tujuan menggali potensi prakarsa kemitraan. Selain itu, program ini juga telah mendorong adanya model kemitraan antara LSM lokal, Pemda dan pihak perusahaan dengan cara memberi dukungan secara penuh kepada LSM lokal untuk menjalankan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan.

Sebagai bagian dari pembelajaran program, IRE mendokumentasikan pengalaman program dalam bentuk buku kecil yang secara umum berisi beberapa hal mulai model kemitraan dan sinergi antar pihak yang bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan, upaya mendorong peran perusahaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan mewacanakan *CSR Pro Poor* yakni skema dana CSR yang bisa dialokasikan sebagai sumber alternatif dalam program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Sumber utama buku ini adalah rangkaian diskusi yang dilakukan dalam lokakarya nasional yang diselenggarakan IRE dengan dukungan UNDEF serta Kementerian Lingkungan Hidup (Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan/Asisten Deputi Urusan

Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi Dan Migas) dan BP Migas yang ikut berperan sebagai pihak pengundang.

Secara umum, buku ini berupaya mempromosikan urgensi kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah industri pertambangan dan migas. Salah satu titik tekan dalam kemitraan yang hendak didorong adalah pentingnya peningkatan performa LSM lokal, mendorong pemerintah memainkan peran koordinasi dan konsolidasi serta mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dan bekerjasama dengan pihak manapun sejauh dalam konteks penanggulangan kemiskinan di daerah industri pertambangan dan migas. Dengan adanya buku ini, diharapkan berbagai wacana atau isu yang dibahas dalam lokakarya nasional tersebut bisa dibaca oleh publik dan berdampak luas.



Audiensi dengan BP Migas



Need Assessment dengan Bappeda Kab. Sumbawa Barat



Suasana Sekolah di Kec. Rantau Pulung Kab. Kutai Timur

Model Kemitraan antar Stakeholder dalam Penanggulangan Kemiskinan

Forum lokakarya nasional yang diselenggarakan IRE-UNDEF di Bangka-Belitung telah menggarisbawahi mengenai strategi kemitraan yang perlu dikembangkan di daerah industri pertambangan dan migas. Dalam forum tersebut, teridentifikasi adanya kesadaran antar pihak untuk mengembangkan strategi penanggulangan kemiskinan secara kemitraan. Kesadaran ini muncul karena selama ini program-program yang telah dilaksanakan tidak mampu menghasilkan *output* dan *outcome* secara maksimal. Proporsi penduduk miskin di daerah industri pertambangan dan migas memang berkurang sebagai implikasi adanya program, tetapi angka kemiskinan relatif masih tinggi. Selain itu, secara kualitatif, masalah kemiskinan masih cukup berat karena adanya kesenjangan ekonomi antar warga khususnya diantara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal, antar sektor dan antar wilayah. Hal tersebut mendorong masing-masing pihak untuk mencari solusi guna mempercepat pengurangan kemiskinan. Solusi tersebut misalnya melibatkan partisipasi masyarakat, peningkatan anggaran atau mengembangkan forum multi stakeholder dan sebagainya.

Walaupun sudah ada ikhtiar untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah industri pertambangan dan migas tersebut, tetapi gagasan mengenai kemitraan masih belum menjadi komitmen bersama antara pemda, perusahaan dan LSM lokal. Sekalipun Forum multi stakeholder di daerah sudah terbentuk, tetapi para pihak belum memiliki kesamaan pandangan yang kuat mengenai model

kemitraan yang efektif untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dengan adanya program IRE-UNDEF, berbagai kendala yang dihadapi *stakeholder* dalam mempromosikan percepatan penanggulangan kemiskinan didiskusikan secara intensif di berbagai forum di tingkat daerah dan nasional. Akhirnya, dapat diketahui bahwa yang dibutuhkan para *stakeholder* dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan adalah adanya model kemitraan yang efektif. Model ini kemudian diasah dalam forum lokakarya nasional agar nantinya bisa diimplementasikan.

Dalam menyajikan pemikiran mengenai model kemitraan tersebut, Sutoro Eko, peneliti senior IRE, menjelaskan bahwa kemitraan harus memiliki konseptualisasi yang operasional. Dia merumuskan kemitraan sebagai perkumpulan orang-orang atau institusi dari kombinasi pemerintah, swasta maupun organisasi masyarakat sipil yang bekerjasama atau bersenyawa (*engagement*) secara sukarela, saling menguntungkan dan inovatif, guna menangani tujuan-tujuan sosial bersama melalui pepaduan (*sinergi*) sumberdaya, kompetensi bahkan strategi. Dalam konsep tersebut, ada beberapa prinsip dasar yang penting untuk menjadi perhatian misalnya menjalin komunikasi secara setara, saling percaya dan saling membutuhkan antara pemerintah dan masyarakat, hubungan saling belajar, tidak didominasi oleh perwakilan dari elemen manapun dan tidak mewakili kepentingan khusus dari sesuatu golongan secara tersendiri.

Sutoro Eko mengingatkan bahwa menjalankan kemitraan tidak sama dengan kerjasama antar pihak. Lebih dari itu, kemitraan lebih mengarah pada level atau bentuk

kolaborasi yakni adanya kerjasama diantara berbagai pihak dalam cara yang kohesif serta masing-masing lembaga menjalankan mandat sesuai kompetensinya.

Sutoro Eko mencontohkan bahwa beberapa prinsip dan upaya kemitraan sebetulnya sudah mulai terlihat di beberapa daerah. Hal ini misalnya bisa dilihat dengan maraknya pembentukan wadah bernama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Forum ini merupakan contoh koordinasi, untuk menghindari tumpang tindih, dan mencapai pemahaman bersama guna melahirkan kebijakan yang lebih kuat terkait penanggulangan kemiskinan. Tetapi sayangnya, TKPKD masih relatif birokratis, sementara perusahaan dan OMS hanya menjadi pelengkap. Selain itu, ada pula forum multi stakeholder di Kutai Timur atau forum ABCG (*Akademisi, Bisnis, Civil Society dan Governance*) di Sumbawa Barat-NTB. Oleh karena itu, Sutoro Eko mengajak semua pihak bahwa dalam merintis terbentuknya kemitraan antar pihak, maka perlu dibangun sejumlah instrumen seperti tata kelola, aturan main dan sebagainya agar forum tersebut bisa semakin bermakna dan dirasakan manfaatnya.

Berbagai masalah yang dihadapi oleh beberapa daerah di atas, maka langkah yang dilakukan IRE kiranya sejalan dengan apa yang diusulkan Sutoro Eko tersebut. Dalam mendorong tumbuhnya kemitraan, IRE mengajak semua pihak untuk duduk bersama membangun perspektif, aturan main, model komunikasi dan sebagainya sehingga secara sedikit demi sedikit bisa meruntuhkan suasana *distrust* atau ego sektoral.

Berbeda dengan Sutoro Eko yang lebih memperhatikan aspek kelembagaan kemitraan dari berbagai literatur dan

pengalaman empiris, Bambang Hidayana lebih menyoroti konsep dan pengembangan kemitraan berdasarkan pengalaman program IRE-UNDEF. Secara empiris ditemukan bahwa pemerintah daerah (pemda) biasanya menyerahkan urusan penanggulangan kemiskinan di wilayah ring 1 tambang kepada perusahaan. Ibaratnya pemda seolah-olah lepas tangan dan memandulkan fungsi koordinasi dan supervisi yang seharusnya diperankan pemda. Persoalan klasik yang biasanya dikemukakan pemda terkait penanggulangan kemiskinan adalah minimnya anggaran dan kurangnya dukungan LSM lokal. Sebaliknya, berbagai inovasi LSM lokal yang responsif terhadap penanggulangan kemiskinan justru seringkali tidak dimanfaatkan oleh pemda untuk melakukan percepatan dan perluasan program penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, Bambang Hidayana menegaskan, program kemitraan ke depan harus membangun tanggung jawab bersama dan sinergisasi antara perusahaan, pemda dan LSM lokal dalam melakukan agenda-aksi secara kolaboratif dan saling percaya serta dalam posisi yang setara dan membutuhkan, bukan penyerahan wewenang dan tugas dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Lebih lanjut Bambang Hidayana mencermati bahwa sesungguhnya banyak program CSR yang diagendakan untuk penanggulangan kemiskinan, tetapi harus diakui bahwa program-program tersebut masih bersifat *high cost* serta belum menjawab secara maksimal masalah kemiskinan yang dialami masyarakat lokal khususnya kelompok marginal. Munculnya *high cost* tersebut karena tidak adanya kerja kemitraan yang sinergis dan kolaboratif antara perusahaan, pemda dan LSM lokal.



Bambang Hidayana juga mengungkapkan bahwa program kemitraan yang seharusnya berbasis *trust*, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum bisa terwujud secara maksimal. Hal ini karena masih ada persepsi bahwa CSR *pro poor* diperkenalkan tetapi dalam pelaksanaannya hanya merupakan strategi pemasaran perusahaan sehingga sebuah perusahaan tersebut sesungguhnya tidak memiliki keberpihakan terhadap masalah sosial di wilayah kerjanya. Akibatnya, perusahaan tersebut mengalami *social distrust* yakni adanya kecurigaan dari pihak luar dan berbagai program CSR yang dipromosikan tidak mendapat respon positif dari masyarakat dan tidak berhasil guna. Adapun pada level LSM, di daerah industri pertambangan dan migas sebetulnya banyak terdapat LSM yang bekerja untuk program pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, peran mereka kebanyakan bukan menjadi mitra perusahaan dan pemda tetapi justru menjadi oposisi. Selain itu, jika ditelisik lebih dalam, masih banyak LSM lokal yang sebenarnya membutuhkan peningkatan kredibilitas dan kapasitas organisasi.



Proses pembuatan dodol dari buah belimbing di Kab. Bojonegoro

Terkait pengalaman promosi kemitraan di beberapa daerah industri pertambangan dan migas, Bambang Hidayana menjelaskan bahwa fokus utama IRE adalah mendorong penguatan LSM lokal di wilayah industri pertambangan dan migas. Sejauh ini, ada beberapa LSM/CBO di wilayah industri pertambangan dan migas yang sudah mengalami penguatan kapasitas terutama dalam berorganisasi. Ini misalnya ditandai dengan adanya perubahan pendekatan antara LSM/CBO dengan perusahaan yang awalnya selalu meminta jatah proyek menjadi membangun kerjasama dan kemitraan. Indikator lain adalah meningkatnya kapasitas LSM/CBO dalam upaya memunculkan program inovatif dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan. Disamping itu, pembelajaran yang tidak kalah penting adalah adanya revitalisasi dan inisiasi baru forum kemitraan antara perusahaan, pemda dan kelompok masyarakat sipil khususnya LSM yang bergerak pada program pemberdayaan masyarakat.

Berpijak dari pengalaman IRE-UNDEF tersebut, maka promosi kemitraan ke depan tidak lain adalah mengembangkan iklim kerjasama, kolaborasi dan payung hukum yang mempertemukan sinergisasi peran perusahaan, pemda dan LSM lokal. Promosi seperti itu sebetulnya bergayung sambut dengan agenda BP Migas dalam mengawal program CSR di daerah migas mulai tahun 2012. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ryan B. Wurjantoro, Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BP Migas. BP Migas bahkan mempromosikan prinsip kemitraan dalam program CSR di lingkungan industri migas. Ryan juga menegaskan bahwa kemitraan tersebut melakukan prinsip sinergisasi antar stakeholder dan upaya saling mendukung terhadap fungsi dan kinerja antar pihak, dan fungsi tersebut tidak mereduksi atau menggantikan fungsi pihak lain. Ryan

menambahkan bahwa dalam melaksanakan program CSR kemitraan di daerah industri migas, maka masyarakat harus dilibatkan. Bahkan, untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus mendapat persetujuan dari masyarakat setempat serta pemerintah daerah.

Sementara itu, Prof. Susetiawan, Dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menjelaskan bahwa konsep CSR dan strategi kemitraan memiliki 3 hal yang penting diperhatikan dan bisa disinergikan; *pertama*, secara filosofi penting adanya kesamaan pemahaman tentang CSR. Hal ini terkait dengan adanya pandangan mengenai CSR sebagai komitmen moral atau sebagai strategi bisnis perusahaan. Dengan adanya dua sudut pandang tersebut, maka posisi CSR sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan sudah barang tentu merupakan bagian dari komitmen moral dan bukan strategi bisnis perusahaan semata. Oleh karena itu, para pihak harus duduk bersama untuk menemukan kesamaan pandangan bahwa CSR untuk program *pro poor* dan bukan untuk kepentingan bisnis semata.

Kedua, secara sosiologis penting untuk didiskusikan tentang kata kunci sinergi dan kemitraan. Dengan adanya kesamaan konsep dan pandangan yang sama, maka hal ini bisa memudahkan para pihak menjalankan program aksi. *Ketiga*, dalam konteks sinergi perencanaan, para pihak penting untuk membicarakan tentang komitmen dalam melakukan perencanaan dan aksi bersama termasuk di dalamnya kontribusi masing-masing pihak dari segi tenaga dan anggaran.

Sebagai pedoman dalam menjalankan kemitraan-sinergi ini, diharapkan masing-masing pihak bisa berkaca atau mempedomani dokumen perencanaan

mulai dari level desa hingga nasional. Terhadap hal ini, Agus Manshur, SE, MA., Kasubdit Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, menekankan bahwa dokumen perencanaan ini diharapkan menjadi acuan bagi para perusahaan terutama pengelola CSR/Comdev dalam upaya menjalankan program-program CSR di masyarakat. Agus juga menegaskan bahwa model kemitraan yang bisa dilakukan adalah dengan cara saling melengkapi, mengisi celah serta memperluas target. Agus mencontohkan bahwa jika di tingkat masyarakat membutuhkan 100 kg gula maka bisa jadi pemda hanya mampu memenuhi 50 kg sedangkan skema CSR bisa mengisi kekurangannya.



Audiensi di PT. Newmont

Hermanto dari Bappeda Belitung menambahkan bahwa kemitraan akan sangat membantu kerja pemerintah daerah. Dalam proses perencanaan, harus diakui bahwa ada banyak usulan kegiatan yang tidak bisa diakomodir oleh pemda karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, dengan adanya kemitraan, Hermanto berharap pengelola program CSR dan pihak pemda bisa bersinergi dan berkomunikasi sehingga masing-masing pihak bisa saling mengisi kekurangannya. Hermanto menambahkan bahwa sebetulnya sejak proses perencanaan sudah dapat diidentifikasi adanya berbagai kegiatan yang tidak bisa dibiayai anggarannya oleh Pemda. Oleh karena itu, maka sejak tahap perencanaan tersebut sinergisasi harus sudah dilaksanakan.

Berbeda dengan Agus, Ir. Muhammad Taswin, Kasubdit Hubungan Komersial Batubara, Dirjen Mineral dan Batubara-Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjelaskan bahwa kemitraan bisa berfungsi sebagai upaya saling belajar antar stakeholder dalam program-program penanggulangan kemiskinan. Bahkan, Taswin juga melihat pentingnya peran perguruan tinggi dan atau LSM yang sudah berpengalaman dalam kerja kemitraan. Hal ini karena mereka memiliki berbagai perspektif dan pendekatan sehingga dapat mempercepat agenda penanggulangan kemiskinan di daerah industri pertambangan.

Kemitraan tidak hanya arena untuk saling belajar tetapi juga bisa dipakai untuk advokasi regulasi. Mering dari Chevron mengingatkan bahwa sekarang ini masih ada masalah regulasi terkait dengan CSR dan program penanggulangan kemiskinan. Salah satu contoh adalah adanya RUU CSR yang diinisiasi oleh Kemensos. Padahal,

sekarang ini sudah ada undang-undang perusahaan yang juga mengatur perihal CSR. Ke depan, perlu ada suatu perubahan regulasi tentang CSR tetapi apakah regulasi tersebut harus diatur melalui undang-undang perusahaan, perminyakan, pertambangan atau masalah-masalah sosial dibawah Kemensos. Sementara itu, muncul juga RUU Perlindungan Masyarakat Adat, dan apakah CSR juga dimasukkan dalam naskah RUU tersebut. Hal ini karena hampir semua masyarakat adat tinggal di daerah tambang. Bahkan secara tradisional, masyarakat adat adalah pemilik sumber daya alam termasuk tambang di daerahnya sebagai hak ulayat. Mering menambahkan, sejalan dengan pembahasan regulasi di level pusat, di beberapa daerah juga mulai muncul usulan-usulan tentang perlunya perda CSR. Hal ini karena daerah berharap perusahaan juga memberi sumbangan yang besar terhadap agenda peningkatan kesejahteraan di daerah.



Inisiatif-inisiatif pentingnya kemitraan yang berkembang di daerah masih perlu mendapat payung hukum agar inisiatif tersebut bisa terwujud dan berbuah bagi penanggulangan kemiskinan. Hal itu penting karena selama ini banyak inisiatif yang tidak bisa direalisasikan karena benturan kepentingan dan resistensi berbagai pihak. Salah satu bukti dikemukakan oleh Suyono, Staf lembaga Transform Mataram-NTB, bahwa ego sektoral antar institusi perusahaan, pemda dan LSM masih tinggi dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Bahkan, di dalam perusahaan masih ada tarik ulur kepentingan antar lembaga yang bertanggungjawab melaksanakan urusan penanggulangan kemiskinan dan bisnis. Di pemda, diantara SKPD masih bersaing untuk mendapatkan dana

dari APBD maupun dana yang berasal dari CSR, tidak berbagi peran secara sinergis dengan perusahaan maupun SKPD terkait secara proporsional-akuntabel.

Sementara itu, Arjohansyah dari Bappeda Kutai Timur, mengingatkan tentang adanya tantangan kemitraan ke depan. Dia menegaskan bahwa peran LSM lokal di daerah seharusnya dimaksimalkan agar tidak mejadi benalu sehingga bisa membantu kerja pemerintah dan perusahaan. Hal ini juga mengingat bahwa masih banyak program yang tumpang tindih antara Pemda dan Perusahaan. Hal ini karena perusahaan cenderung masih mementingkan kuantitas program daripada kualitas program. Akibatnya, banyak program yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi warga.

Ke depan, Bambang Hidayana mengusulkan agar semua pihak bisa berperan maksimal dalam mewujudkan kemitraan. *Pertama*, LSM lokal tidak hanya menjalankan fungsi advokasi dan mengontrol kinerja pemda dan sektor swasta tetapi juga mampu berperan sebagai mitra perusahaan. *Kedua*, perusahaan sebaiknya juga turut memfasilitasi penguatan peran LSM lokal dan CBO dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, pemda juga memperkuat kerjasama dengan LSM lokal dan perusahaan dengan berperan sebagai koordinator, fasilitator atau regulator yang relevan untuk mendukung kelembagaan kemitraan.



Kunjungan IRE di PT. Newmont Kab. Sumbawa Barat



Pelatihan pembuatan kompos

Keterlibatan Perusahaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Selama ini, program penanggulangan kemiskinan di daerah dilaksanakan oleh berbagai stakeholder. Bahkan pemerintah desa (pemdes) juga dilibatkan dalam program tersebut. Pemdes mengusung program dengan menggunakan musrenbang desa. Hasil musrenbang desa ini ada yang ditindaklanjuti dalam bentuk program yang dilaksanakan oleh pemdes sesuai kewenangannya, dan ada yang diusulkan ke atas untuk ditindaklanjuti SKPD terkait. Meskipun ada sistem perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan desa untuk melaksanakan program kemiskinan, tetapi faktanya kemiskinan di desa masih relatif tinggi. Selain itu, berbagai kebutuhan dan masyarakat dalam bentuk tersedianya infrastruktur yang layak dan mata pencaharian hidup yang *sustainable* tidak terpenuhi secara maksimal. Desa-desa di wilayah migas juga mengalami masalah yang sama. Oleh karena itu, diskusi mengenai format perencanaan pembangunan desa di wilayah industri pertambangan dan migas selama ini perlu dikaji kembali agar memperhatikan juga agenda kemitraan.

Dalam tema diskusi tentang perencanaan desa di wilayah industri pertambangan dan migas, muncul gagasan segar mengenai pengembangan sistem perencanaan pembangunan desa yang lebih memperhatikan agenda kemitraan. Selama ini, musrenbang di tingkat desa-kecamatan hingga kabupaten hanya melibatkan kelompok sektoral tetapi kurang melibatkan perusahaan migas dan tambang. Padahal, perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang sangat kuat dan memiliki program CSR yang

bisa bergayung sambut dengan program desa maupun pemda. Apabila terjadi sinergisasi, maka banyak masalah desa yang selama ini kurang dapat dipecahkan oleh pihak pemerintah desa atau pemda bisa diatasi dengan kehadiran perusahaan tersebut.

Gagasan tersebut misalnya disampaikan oleh Agus Manshur, SE, MA., Kasubdit Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Menurut Agus, keterlibatan pihak perusahaan melalui divisi Comdev atau pengelola CSR bisa dilakukan di level musrenbang tingkat kecamatan. Pilihan terhadap kecamatan ini karena biasanya delegasi dari desa masih cukup banyak serta bisa dilakukan sinkronisasi dan konsolidasi terhadap berbagai kegiatan atau program yang diusulkan. Hal ini tentu berbeda jika terlibat dalam level kabupaten yang biasanya lebih banyak bersifat memutuskan suatu usulan.

Selain itu, musrenbang di level kecamatan juga merupakan arena yang mempertemukan banyak pihak mulai dari delegasi desa, perwakilan SKPD bahkan anggota DPRD. Adanya pertemuan ini diharapkan bisa memunculkan adanya pembagian peran antara satu pihak dengan yang lain. Untuk memaksimalkan pembagian peran tersebut, maka pelembagaan kemitraan bisa dijadikan alternatif untuk mewadahi kepentingan berbagai pihak.

Agus juga mengusulkan untuk mengefektifkan sinergi perencanaan antara swasta dan pemerintah maka perlu dibentuk “Forum Komunikasi CSR dan Musrenbang” yang akan menjadi forum kerjasama swasta dan pemerintah dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berbagai program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pandangan berbeda disampaikan Drs. Wijanarko Setyawan, MSc., Asisten Deputi 2 Urusan Pemberdayaan Masyarakat-Kemenkoksera. Menurut Wijanarko, identifikasi peran dan program atau kegiatan yang hendak dilakukan CSR bisa dilakukan pada waktu forum SKPD. Sedangkan dalam forum musrenbang kabupaten/kota, pengelola CSR bisa memberikan komitmen atau kesepakatan terkait program atau kegiatan yang hendak didanai.

Selain itu, dalam konteks sistem perencanaan pembangunan, Wijanarko menjelaskan bahwa program CSR disusun berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Wijanarko menerangkan bahwa di Kota Solo, Program Tim CSR Kota Solo disusun berdasarkan RPJMD Kota Solo. Dengan bercermin pada RPJMD, maka program CSR diharapkan bisa mendukung program pembangunan pemerintah, baik di level desa hingga kabupaten, yang telah disusun dan disepakati oleh berbagai stakeholder di daerah yang bersangkutan.

Sementara itu, dalam pandangan Soeharman Noerman, Chair for Partnership, Institutional and Advocacy-Corporate Forum For Community Development (CFCD), keterlibatan sektor perusahaan dalam sistem perencanaan pembangunan yang didorong oleh pemerintah sebaiknya dilakukan dengan semangat keterbukaan dan akuntabel sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan program atau kegiatan. Hal ini dikhawatirkan bisa membuka peluang untuk terjadinya tindakan korupsi di mana satu program atau kebutuhan dibiayai secara ganda baik melalui dana APBN/APBD atau dengan dana yang bersumber dari CSR.



Unit Pengelolaan Sampah Organik di Dsn. Gunung teknik Kec. Sangatta Selatan-Kutim



Pengrajin Paving Block di Sumbawa Barat

CSR *Pro Poor*

■ khtiar penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan LSM lokal di daerah industri pertambangan dan migas seringkali terbentur pada minimnya dukungan finansial dan pada kurangnya sensitifitas masalah kemiskinan. Anggaran yang seharusnya berasal dari pemda untuk mendukung program yang dilakukan LSM lokal dirasa kurang memadai. Selain itu, LSM lokal juga masih banyak terbentur pada kebijakan dan program pemda yang tidak *pro poor*, sehingga walaupun LSM lokal menjalankan program kemitraan dengan pemda tetapi belum secara maksimal menjawab permasalahan kemiskinan di daerah.

Berkaca pada konteks permasalahan di atas, upaya penanggulangan kemiskinan di daerah khususnya di wilayah industri pertambangan dan migas pada dasarnya bisa memanfaatkan dana CSR. Dana ini tersedia relatif memadai untuk menunjang program-program pemberdayaan masyarakat khususnya penanggulangan kemiskinan. Namun demikian, walaupun program CSR ada yang sudah menyentuh permasalahan kemiskinan tetapi secara umum belum dimaksimalkan menjadi agenda utama program CSR. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah pemikiran yang mendalam tentang bagaimana mendayagunakan dana CSR tersebut agar sebesar-besarnya dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan di daerah.

Pemikiran tentang CSR *pro poor* tersebut di atas bergayung sambut dengan gagasan Ryan B. Wurjantoro, Dinas Humas dan Hubungan Kelembagaan BP Migas. Ia menuturkan

bahwa berdasarkan pengalaman BP Migas selama ini, program CSR memang difokuskan pada pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Walaupun demikian, makalahnya mengungkapkan adanya beberapa permasalahan terkait CSR sebagai sumber alternatif dalam pembiayaan program penanggulangan kemiskinan. *Pertama*, pelaksanaan program-program CSR seringkali berbenturan dengan program-program pemda dalam melakukan agenda penanggulangan kemiskinan. *Kedua*, pemda seringkali menggantungkan pada perusahaan untuk melakukan agenda penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya tanpa melibatkan pemda secara langsung untuk merumuskan bentuk kegiatan dan pembiayaannya. *Ketiga*, program CSR terkait penanggulangan kemiskinan seringkali dilaksanakan tanpa didiseminasikan ke pemda dan LSM lokal sehingga seringkali kurang dipercaya hasilnya dan dampaknya terhadap penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Ryan menambahkan, pihak BP Migas biasanya kesulitan dalam menemukan mitra kerja yang kapabel dan kredibel untuk menjalankan program CSR di daerah. Tidak kalah penting, beberapa pemda seringkali belum bisa terlibat secara maksimal dalam pelaksanaan program CSR tersebut.

Ditinjau secara regulasi, Teguh Haryono R, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan-Kemensos, mengatakan bahwa pada dasarnya UU No. 13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dapat dipakai sebagai kerangka landasan untuk mempromosikan program CSR *pro poor*. Hal ini karena dalam regulasi tersebut, khususnya bagian keempat pasal 36 (1) menyebutkan bahwa sumber pendanaan dalam penanganan fakir miskin meliputi APBN, APBD, dana yang disisihkan dari perusahaan perseroan, dana hibah baik dari dalam maupun luar negeri dan sumber dana lain

yang sah dan tidak mengikat. Dengan demikian, ada dana CSR yang disisihkan oleh perusahaan untuk digunakan bagi program penanganan fakir miskin.

Berpijak dari adanya regulasi di atas, maka alokasi dana yang bersumber dari perusahaan melalui skema CSR atau *Community development* diharapkan makin mendukung upaya pengentasan kemiskinan di daerah khususnya di wilayah kerja industri pertambangan dan migas. Program CSR tersebut dapat dilaksanakan di lokasi kerja industri atau sekitarnya. Akan tetapi, pada prinsipnya program tersebut harus menjawab masalah kemiskinan.

Teguh Haryono juga menegaskan bahwa jika upaya penanggulangan kemiskinan hanya mengandalkan dana atau anggaran dari APBN semata, maka sisi kemajuannya akan lambat. Sejauh ini, peran CSR sudah mulai muncul untuk terlibat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tetapi tata kelola dan anggaran CSR untuk program ini belum didesain secara baik sehingga belum bisa dilihat efektifitasnya dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, Teguh mengingatkan agar ke depan, perlu dikembangkan sebuah desain dan *road map* agenda percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program CSR di daerah.

Terkait penggunaan dana CSR untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, pengalaman di Jawa Timur menarik untuk dikupas. Menurut Ir. Suharno, staf Bappeda Prov. Jawa Timur, selama ini, pemerintah daerah hanya memberikan wawasan dan gambaran kondisi kemiskinan di daerah tanpa mengatur detail program CSR di wilayah kerja perusahaan. Dengan demikian, pemda tidak mengatur secara teknis dalam pelaksanaan program atau kegiatan CSR tersebut.

Sutoro Eko, Peneliti senior IRE, menegaskan bahwa skema CSR *pro poor* bisa berorientasi pada upaya mendorong dan memperkuat posisi warga dalam pembangunan sehingga bisa menjadi subyek dan tidak pada posisi obyek pembangunan. Dengan demikian, warga perlu didorong menjadi warga aktif (*active citizen*). Selain itu, Sutoro Eko menegaskan bahwa agenda penguatan LSM lokal perlu diarusutamakan agar terjadi keseimbangan pembangunan terutama di daerah tambang dan migas. Dengan kehadiran LSM lokal yang kuat maka akan mengoptimalkan proses *delivery* kebijakan pemda dan agenda CSR perusahaan. Sutoro mengingatkan juga bahwa CSR bisa dimaknai sebagai instrumen untuk katalis perubahan. Jika dilihat secara obyektif, keberadaan CSR nampaknya lebih panjang daripada keberadaan lembaga-lembaga donor yang mengurus program kemiskinan. Akan tetapi, lanjut Sutoro, dalam konteks penanggulangan kemiskinan, skema CSR bisa dimanfaatkan dengan skema donor atau pilantropi yang memiliki tiga kekuatan utama yakni pengetahuan, jaringan dan dana.

Rencana Ke Depan

Sebagaimana dijelaskan di atas, implementasi program CSR dalam tata kelola industri pertambangan dan migas mengharuskan adanya kemitraan antar pihak pemerintah daerah, perusahaan, kelompok masyarakat sipil dan warga. Kemitraan tersebut mutlak dilaksanakan karena sejalan dengan kebijakan BP Migas sebagaimana disampaikan dalam lokakarya nasional ini, karena BP Migas menegaskan agar program CSR itu merupakan program yang sinergis antar perusahaan dengan pemda.

Komitmen kemitraan tersebut mendapat dukungan positif dari para peserta lokakarya nasional yang terdiri dari Kementerian, BP Migas, Bappenas, Pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi, Akademisi kampus, hingga LSM nasional dan daerah. Para peserta bahkan memandang perlu adanya sebuah forum antar pihak atau multistakeholder yang mempunyai kepentingan dengan program CSR *propoor*. Forum multistakeholder ini didesain bersifat terbuka bagi perusahaan migas dan nonmigas, yang merupakan wadah *sharing* belajar antar satu sama lain, ajang belajar dan komunikasi dan kerjasama. Forum multistakeholder ini diharapkan juga agar menjadi mitra pemerintah guna mewujudkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah. Tidak kalah penting, forum multistakeholder ini diharapkan juga menjadi *bridging institution*, yaitu jembatan antar anggota-anggota forum sehingga melahirkan solusi yang tepat dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan pada pesan lokakarya agar terbentuk forum multistakeholder tersebut, IRE, Pusat Studi Perdesaan

dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK UGM), Laboratorium Antropologi untuk Riset dan Aksi (LAURA) UGM dan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSDK) Fisipol UGM Yogyakarta berkomitmen untuk mengawal kelahiran forum ini dengan mendirikan Sekretariat Bersama (Sekber) yang bertempat di kantor IRE. Forum multistakeholder nantinya juga akan merangkul semua pihak baik swasta, masyarakat sipil dan pemerintahan khususnya di lingkungan BP Migas, Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam pengelolaan sekber tersebut, IRE akan mengambil peran sebagai koordinator Sekber yang bertugas mengolah isu-isu terutama terkait CSR dan kemitraan dalam tata kelola industri pertambangan dan migas. Sedangkan lembaga-lembaga lainnya yang bergabung ikut mendukung aktivitas Sekber dalam bidang pengembangan program, jaringan dan dukungan anggaran. Forum juga mengingatkan bahwa diharapkan anggaran program dapat ditanggung bersama oleh para anggota sesuai dengan kemampuan.

Lampiran

A. Profil IRE



INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT (IRE) adalah sebuah lembaga independen, nonpartisan, dan nonprofit yang berbasis pada komunitas akademik di Yogyakarta. Fokus kegiatan IRE adalah memperluas dan memperdalam demokrasi melalui penguatan gagasan, sikap kritis serta tindakan taktis elemen masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, dan negara.

IRE berdiri di Yogyakarta pada tanggal 2 Juni 1994. Pendirian lembaga ini berangkat dari sebuah respons terhadap hilangnya otonomi dan daya kritis masyarakat

dalam menghadapi berbagai bentuk konstruksi sosial politik yang represif dan diskriminatif, yang berasal dari rezim global, negara, pasar, maupun konteks sosio-kultural yang berakar dalam masyarakat. Masyarakat sangat tidak berdaya (*powerless*) ketika berhadapan dengan struktur sosial politik dan kultur yang melingkupinya.

Ketidakberdayaan masyarakat lokal karena kontrol dan dominasi melalui sarana-sarana represif negara di tangan birokrasi dan militer. Lewat pasar, negara melakukan monopoli dan eksploitasi yang menimbulkan masyarakat dalam posisi marginal. Meskipun negara tampil dominan dan hegemonik, tetapi dikelola secara tidak transparan dan tidak bertanggungjawab, bahkan digero-goti oleh praktik-praktik perampasan dan korupsi yang merajalela. Dalam konteks ini yang terjadi adalah negara yang lembek (*soft state*), yakni negara yang miskin kapasitas dalam mengawal transformasi ekonomi, redistribusi sosial dan mengelola konflik antar aktor sosial dalam masyarakat.

Di sisi lain masyarakat dalam posisi marginal karena dampak dari imperialisme rezim global melalui media pasar. Rezim global menimbulkan ketergantungan masyarakat melalui media negara. Bahkan rezim global melancarkan homogenisasi dan regimentasi budaya melalui media sosio-kultural yang menyebabkan alienasi dan isolasi masyarakat. Dalam konteks sosio-kultural, dimana masyarakat hidup sehari-hari, juga terjadi diskriminasi melalui instrumen agama, etnis, gender, umur, ras, dan sebagainya, sehingga menimbulkan *uncivility*.



Era transisi demokrasi pasca tumbangnya Orde Baru membuka harapan baru bagi masyarakat Indonesia, sekaligus juga tantangan. Restriksi negara mulai mengendor, tetapi euforia di era transisi justru diikuti dengan merebaknya kekerasan horizontal dalam konteks sosio-kultural masyarakat. Orang bisa melihat merebaknya kekerasan horizontal di berbagai daerah atau munculnya “tirani mayoritas” yang berbasis pada agama, etnis, ras, dan sebagainya. Di tempat lain, masyarakat lokal juga belum bisa lepas dari tekanan rezim internasional yang melewati media pasar dan konteks sosio-kultural.

Ketidakberdayaan masyarakat lokal itulah yang sampai saat ini tetap menjadi “justifikasi sosial” bagi IRE untuk tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Melalui upaya-upaya pemberdayaan IRE tetap berkiprah untuk memberikan sumbangsih bagi terwujudnya kemandirian dan *democratic civility* masyarakat lokal.

IRE, dengan bekal perspektif kritis, mempunyai mandat pemberdayaan untuk mengembangkan sejumlah nilai yang inheren dalam demokrasi: kemajemukan, otonomi, kemandirian, kesetaraan, persamaan, *civility*, keterbukaan, antikekerasan, antidominasi, antidiskriminasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, IRE menyatakan “perang” terhadap wacana dan praktik-praktik aktor-aktor yang anti terhadap nilai-nilai demokrasi itu.

Visi IRE adalah menjadi organisasi yang berperan dalam mengembangkan pengetahuan untuk memengaruhi kebijakan strategis menuju terwujudnya negara yang kuat dan masyarakat lokal yang mandiri. Adapun misi IRE sebagai berikut:

1. Mengembangkan pengetahuan melalui penelitian, pengembangan kapasitas, dan publikasi.
2. Membangun persenyawaan (*engagement*) multipihak untuk reformasi kebijakan.
3. Mendorong negara bertanggung jawab memenuhi hak-hak warga dan komunitas .
4. Memperkuat emansipasi entitas lokal yang berorientasi kesejahteraan.

Dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi, IRE berpegang teguh pada prinsip: kebebasan, persaudaraan, kesetaraan, keterbukaan, kemitraan, toleransi, dan akuntabilitas.

Untuk mencapai misi di atas, IRE mendisain empat aktivitas utama. *Pertama*, penelitian aksi yang bersifat kritis dan partisipatif terhadap berbagai fenomena ketidakberdayaan masyarakat, terutama untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah dan kebutuhan masyarakat. Hasil-hasil penelitian senantiasa dirumuskan sebagai modal untuk keperluan program aksi dan perubahan dalam masyarakat.

Kedua, pendidikan dan pelatihan, yang merupakan wahana untuk menghimpun dan mendiseminasikan pemikiran kritis dan wacana-wacana alternatif di berbagai komunitas aktor yang berasal dari negara, masyarakat politik, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi, yang acapkali tidak mampu difasilitasi oleh institusi yang telah ada. Pendidikan dan pelatihan juga sebagai media asistensi untuk meningkatkan kapasitas aktor-aktor strategis seperti birokrat lokal, politisi, kaum profesional, peneliti, aktivis sosial, mahasiswa, dan lain-lain.

Ketiga, publikasi, yang merupakan sarana artikulasi dan sosialisasi ide-ide kritis yang ditimba dari berbagai pemikiran dan aktivitas kelembagaan. Bentuk dan hasil publikasi ini adalah Bulletin Flamma, Jurnal Mandatory, dan buku. Keempat, advokasi, yaitu gerakan bersama (melalui pengorganisasian, analisis kebijakan, dialog, dan public hearing) untuk melakukan perubahan kebijakan publik di ranah negara dan rekayasa budaya dalam arena masyarakat sipil.

Pada awal keberadaannya tahun 1994, IRE menjalankan aktivitas sebagai kelompok studi yang membicarakan masalah-masalah sosial-politik melalui diskusi rutin, termasuk mengkaji literatur-literatur sosial dan politik terbaru. Kompas dan Jawa Pos banyak membantu kegiatan diskusi rutin IRE. Mulai tahun 1997 hingga sekarang, kegiatan IRE tidak lagi hanya memainkan peran sebagai kelompok studi yang berkuat pada diskusi rutin, tetapi berkembang menjadi LSM yang berkiprah pada pengembangan demokrasi bagi masyarakat. Berikut ini akan diuraikan pengalaman IRE terkait dengan isu penanggulangan kemiskinan

1. Pada bulan Agustus 2007 sampai dengan Agustus 2008, IRE bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership (AIP) melaksanakan kegiatan "Revitalising Craftwomen of Batik Cottage Industry in Bantul". Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengrajin batik perempuan di Desa Wukirsari, Imogiri yang usahanya hancur akibat bencana gempa bumi. Selain itu program ini juga bermaksud untuk merespon kaum marginal perempuan agar mereka mempunyai kapasitas dalam mengelola kerajinan tangan batik,

mempunyai kemampuan untuk membuka akses dan jaringan, mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kontrol terhadap teknologi produksi dan kapital, serta mempunyai kemampuan untuk mengelola pemasaran.

2. Pada Desember 2009 s.d. Agustus 2010, bekerjasama dengan Yayasan TIFA, IRE Yogyakarta menyelenggarakan program "Mendorong Reformasi Kebijakan Daerah untuk Perencanaan Pembangunan dan Alokasi Budget yang Berpihak pada Desa dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penanggulangan Kemiskinan". Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong reformasi kebijakan dan tata kelola pembangunan daerah (*policy, delivery* sistem, implementasi, dan evaluasi) yang berorientasi pada program penanggulangan kemiskinan dan ADD dengan berbagai skema program pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Hasil yang diharapkan dari program ini antara lain adalah 1. Terpetakannya sejumlah permasalahan mengenai kebijakan, tata kelola, pelembagaan, dan manfaat program pembangunan kemiskinan dan ADD di Gunungkidul, 2. Meningkatnya kapasitas pemerintah desa, pemerintah daerah, dan stakeholders dalam melakukan advokasi program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten dan desa, 3. Adanya draft naskah kebijakan program pembangunan kemiskinan di desa, 4. Adanya komitmen pemerintah desa, kabupaten, DPRD, dan stakeholders lokal dalam mendorong kebijakan dan tatakelola program penanggulangan kemiskinan di desa.
3. Bekerja sama dengan FORD Foundation, IRE Yogyakarta dipercaya menjadi *lead agency* program

"Institutionalizing the Participaton of Poor and Marginalized Groups in Public Decision Making to Promote Pro Poor Resource allocation in Health, Education, and Land Access in Fifteen Districts/Cities" kerjasama FITRA, FPPM, Prakarsa, dan Inisiatif, selama periode Januari 2009 s.d. Januari 2011. Program penelitian ini bertujuan untuk menemukan pelajaran berharga dari praktik-praktik yang baik didalam pemenuhan hak masyarakat miskin untuk kesehatan dan pelayanan pendidikan dan bidang yang lain yang kontekstual dengan kebutuhan tiap daerah di enam kabupaten/kota. Program yang riset ini merupakan bagian dari kerjasama antar pemerintah, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang berbasis di Kementerian Kesra, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN); jaringan LSM seperti Asosiasi Pemberdayaan Masyarakat (ACE) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti petani kecil, buruh tani, perempuan miskin, masyarakat adat, nelayan kecil, dsb) yang didipilih di enam kabupaten/kota sasaran, yaitu Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kabupaten Jembrana, Bali, dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

4. Pada November 2009 s.d. Januari 2012, IRE Yogyakarta melalui program "Memperkuat Peran LSM Lokal di Daerah Industri Pertambangan untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan", dipercaya oleh United Nation (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melalui badan *The United Nations Democracy Fund* (UNDEF) untuk menjalankan program kemitraan

antara pemerintah daerah, perusahaan tambang dan minyak, dan LSM lokal yang terpercaya untuk mendorong penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia, meliputi daerah : 1. Kabupaten Blora, Tuban, dan Bojonegoro, Jawa Tengah, 2. Kabupaten Kutai Timur, 3. Kabupaten Kutai Kertanegara, 4. Kabupaten Sumbawa Barat, dan 5. Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan program ini, peran LSM-LSM lokal akan dikuatkan sebagai agen pemberdayaan dalam komunitas, yang menjalankan program CSR dan CD guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin kesetaraan gender.



Pelatihan pembuatan dodol dari buah blimbing di Kab. Bojonegoro-Jawa Timur

5. Daftar Peserta dan Narasumber Lokakarya Nasional

Daftar Pembicara dan Peserta Lokakarya Nasional 3

NARASUMBER

NO	NAMA	INSTANSI	KETERANGAN
1	Agus Manshur, SE, MA	Kasubdit Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	Keynote speaker
2	Dr. Bambang Hudayana	Manajer Program IRE- UNDEF	Narasumber
3	Ryan Wuryantoro	Kepala Dinas Humas & Kelembagaan BPMigas	Narasumber
4	Sigit Reliantoro	Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas Kementerian Lingkungan Hidup	Narasumber
5	Muhammad Taswin	Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral	Narasumber
6	Wijanarko Setyawan	Asdep 2 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	Narasumber

7	Teguh Haryono R	Dirjen Pemberdayaan Sosial & Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial	Narasumber
8	Suharman Noerman	Ketua Bidang Kemitraan Corporate Forum for Community Development (CFCD)	Narasumber
9	Sutoro Eko	Peneliti Senior IRE Yogyakarta	Narasumber

Daftar Hadir Peserta Lokakarya Nasional 3

PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	INSTANSI
1	Arjohansyah	Kepala Bidang Sosbud Bappeda Kab. Kutai Timur
2	Syaiful	Staf Bidang Sosbud Kab. Kutai Timur
3	Intan	Staf Bidang Sosbud Kab. Kutai Timur
4	Zubair	Staf Bidang Sosbud Kab. Kutai Timur
5	Rusli	Staf Bidang Sosbud Kab. Kutai Timur
6	Puput Kamariyah	Staf Bidang Sosbud Kab. Kutai Timur
7	Agustina	Staf Bidang Sosbud Kab. Kutai Timur

8	Eka Nursanti	Staf Bidang Sosbud Kab. Kutai Timur
9	Erliyan Noor	Kepala Bappemas Kab. Kutai Timur
10	Machmudan	Bappeda Kab. Kutai Kartanegara
11	Maryono	Staf Bappemas Kab. Kutai Kartanegara
12	Junaedi	Kabid LPE, SDA Bappemas Kab. Kutai Kartanegara
13	Muhammad Suharno	Kabid Sosbud & Pemerintahan Bappeda Kab. Sumbawa Barat
14	Ir. Hermanto	Kepala Bappeda Kab. Belitung

PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	INSTANSI
15	Ir. Suharno	Fungsional Perencana Madya Bid. Pembiayaan Pembangunan Bappeda Prov. Jawa Timur
16	Ir. Syaiful Wisnu	Kabid Sosbud Bappeda Prov. Kepulauan Bangka Belitung

NGO NASIONAL

NO	NAMA	LEMBAGA
1	Ari Primantoro	Bina Swadaya Jakarta
2	Dwi Sandi Merwanto	CECT Universitas Trisakti
3	Reza Ramayana	CSR Indonesia
4	Suyono	Transform Kab. Sumbawa Barat
5	Tjuk Prabowo	Staf Kerjasama Multipihak TNP2K Jakarta

PERWAKILAN PERUSAHAAN

NO	NAMA	PERUSAHAAN
1	Nurul Karim	Supt. Conservation & Agribusiness Kaltim Prima Coal (KPC)
2	Ahdiat Amril	Sr. Specialist Reporting PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT)
3	Faozan Maulad	General Supervisor Community Capacity Building Community Development PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT)

PERWAKILAN PERUSAHAAN

NO	NAMA	PERUSAHAAN
1	Abdul Muis	Sr. Supervisor Scholarship & Education Community Development PT. Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT)
2	Suhardi	Chevron Pacific Indonesia di Jakarta
3	Mering Ngo	Advisor Community Engagement Chevron Pacific Indonesia di Rumbai, Riau
4	Harry Bustaman	Chevron Pacific Indonesia di Jakarta
5	Sri Kustini	Humas Pertamina E&P Jakarta
6	Rochmat Djatmiko	Total E&P Indonesia di Balikpapan
7	Andi Renggana	Com/MTH Total E&P Indonesia
8	Afdal	Government & Public Affairs PetroChina Int Comp

PERGURUAN TINGGI

NO	NAMA	PERGURUAN TINGGI
1	Andi Sandi, SH. MA	Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM)
2	Bahrudin, MSi	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM)
3	Dr. Setiadi Prabowo	Dosen Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM)
4	Prof. Susetawan	Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM)

TAMU UNDANGAN

NO	NAMA	INSTANSI
1	Ch. Nety Widayati	Kementerian Lingkungan Hidup
2	Febrian Dama Asmara	BPMigas

IRE Yogyakarta

- 1 Dr. Bambang Hidayana
 - 2 Sutoro Eko, MSi
 - 3 Arie Sujito, MSi
 - 4 Sukasmanto, MSi
 - 5 Abdur Rozaki, MSi
 - 6 Krisdyatmiko, MSi
 - 7 Zainal Anwar, MSi
 - 8 Dina Mariana, SH
 - 9 Machmud, SHi
-





Loknas 3 di Pangkal Pinang